

# SMART CITY

BUILDING TOMORROW'S CITIES



## DISKOMINFO PGK



INDUSTRY



SOCIETY



HOME



ENERGY



MOBILITY



RETAIL



HEALTHCARE



SECURITY



# RENSTRA

## TAHUN 2024 - 2026

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dikarenakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 telah dapat disusun dengan baik. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan rencana tiga tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPD Pemerintah Kota Pangkalpinang 2023 – 2026.

Dalam rangka penyediaan instrumen pengukuran kinerja instansi pemerintah yang berkorelasi dengan pencapaian visi, misi Walikota Pangkalpinang dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Periode 2023-2026.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah kota pangkalpinang dan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya.

Demikian Perubahan Renstra ini kami susun, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam upaya mewujudkan visinya.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi  
Dan Informatika Kota Pangkalpinang

Febri Yanto, S.I.P  
NIP. 198802152010101001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II GAMBARAN KINERJA PELAYANAN .....	12
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	27
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	59
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	66
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD .....	67
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi.....	67
3.2. Telaahan Renstra Kementrian Kominfo RI 2015-2019.....	70
3.3. Telaahan Renstra Diskominfo Prov. Kep. Babel 2017-2022	72
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	74
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	75

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN .....	77
	4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	77
	4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	77
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	81
	5.1. Strategi .....	81
	5.2. Arah Kebijakan .....	81
BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN .....	85
BAB VII	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN .....	99
BAB VIII	PENUTUP .....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	28
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	30
Tabel 2.3	Analisis Beban Kerja .....	30
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Kantor.....	34
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	61
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2018-2020 .....	63
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2021-2022 .....	64
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	73
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	75
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang .....	78

Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang .....	82
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang .....	89
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026.....	100
Tabel 7.2	Sasaran Program dan Kegiatan .....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....	26
Gambar 2.1 Persentasi Jumlah Pegawai.....	27
Gambar 2.2 Persentasi Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	29
Gambar 2.3 Persentasi Jumlah PHL Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	29
Gambar 2.4 Persentasi Realisasi Anggaran Tahun 2017-2020.....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, strategis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Indonesia, sejahtera dan makmur. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan pembangunan daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif.

Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di bidang Perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan Pembangunan.



Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 201 Ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pernyataan tersebut jabatan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang diisi oleh Pj Walikota sebagai pengganti Walikota yang masa jabatannya sudah berakhir di Tahun 2023. Menindaklanjuti pernyataan diatas, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Selanjutnya, RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun selama periode tersebut.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tantang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 6402);

17. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan

- Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penetapan Standar pelayanan Minimal (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  26. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru;
  27. Peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
  28. Peraturan gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencanan pembangunan daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
  29. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Pergagkat daerah Kota Pangkalpinang.
  30. Peraturan Walikota Pangkalpinang No.9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota PAngkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144), Tanggal 15 Maret 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Menyediakan dokumen rencana strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 untuk kurun waktu tiga tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

#### **b. Tujuan**

- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistic dan urusan persandian selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mendukung visi dan misi walikota pangkalpinang
- Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026 untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.
- Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam Menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan Dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, meliputi :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisikan tentang:

Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berisikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tiga tahun mendatang.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika beserta faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPD dalam periode tahun 2024-2026. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan RPD. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Pada bagian ini mengemukakan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi RTRW.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pada bagian ini mengemukakan apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang.

## **Bab VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kota Pangkalpinang, memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang persandian dan urusan pemerintah bidang statistik.

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
  - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
  - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi;
  - c. Seksi Layanan e-Government.
2. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik
  - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
  - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
  - c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
3. Kepala Bidang Persandian dan Statistik membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
  - a. Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian;
  - b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian;
  - c. Seksi Statistik

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang ditetapkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika.
  - b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota.
  - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Komunikasi dan Informatika.
  - d. Penetapan rencana kerja dinas Komunikasi dan Informatika menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan.
  - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informatika.
  - f. Pelaksanaan perencanaan bidang Komunikasi dan Informatika.
  - g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana ; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
2. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Dinas Komunikasi dan Informatika; dan;

- e. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kepala Sub Bagian Umum** dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
  - d. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - e. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada public, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi secara berkala; dan
  - f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan** mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kegiatan anggaran/Dokumen Pelaksanaan anggaran Kesekretariatan) Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - b. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - c. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - d. Pelaksanaan analisis keuangan Komunikasi dan Informatika;
  - e. Perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - f. Pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  - g. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. **Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kota;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota ; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. **Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengelolaan Informasi Publik. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan informasi publik ;
  - b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan informasi publik;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di Kota ;
  - d. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah ;
  - e. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah ;
  - f. Pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah ;
  - g. Pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Layanan Pengaduan Masyarakat di Kota.
7. **Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengelolaan Komunikasi Publik. Kepala Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik.
  - b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik.

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- d. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial).
- e. Pengumpulan pendapat umum survei, jajak pendapat).
- f. Pengolahan aduan masyarakat di Kota Pangkalpinang.

**8. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.
- e. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media.
- f. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi.
- g. Layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.
- h. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal dan
- i. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.

9. **Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e- Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
  - c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota ;
- e. Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kota;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer(GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota Pangkalpinang.
- g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- 10. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Infrastruktur dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
  - b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
  - d. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC).
  - e. Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government.
  - f. Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing.
  - g. Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan public, Layanan filtering konten negatif dan
  - h. Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.
- 11. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi.
- c. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- e. Layanan manajemen data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kota.
- f. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.
- g. Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik.
- h. Penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, Layanan recovery data dan informasi.
- i. Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan.
- j. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik.
- k. Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan dan
- l. Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah.

**12. Kepala Seksi Layanan e-Government** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Layanan e-Government. Kepala Seksi Layanan e-Government mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota

- b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota.
- d. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik layanan penanganan insiden keamanan informasi.
- e. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi.
- f. Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah.
- g. Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.
- h. Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah dan
- i. Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparaturn pemerintahan.

**13. Kepala Bidang Persandian dan Statistik** mempunyai tugas tata kelola persandian, operasional persandian, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah serta penyelenggaraan pengumpulan dan penyediaan data statistik skala kota. Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi dan pengawasan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian ;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data dan penyediaan data statistic skala kota ;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Statistik Pemerintah di Kabupaten/Kota.

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Persandian dan Statistik Pemerintah di Kabupaten/Kota .
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Persandiandan Statistik di kabupaten/kota dan
- g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**14. Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian** mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah lingkup Tata Kelola Dan Operasional Persandian. Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi.
- c. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d. Pengelolaan sumber daya persandian;
- e. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- f. Perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi.
- g. Pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi.
- h. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi dan
- i. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.

**15. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian** mempunyai tugas melaksanakan operasional pengamanan komunikasi sandi dan pengawasan pengamanan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan peraturan teknis pengamanan komunikasi sandi, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi.

- b. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya.
- c. Pengamanan informasi elektronik;
- d. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi.
- e. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi.
- f. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- g. Perumusan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian yang meliputi tata kelola persandian.
- h. Pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian;
- i. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatakelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- j. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian.

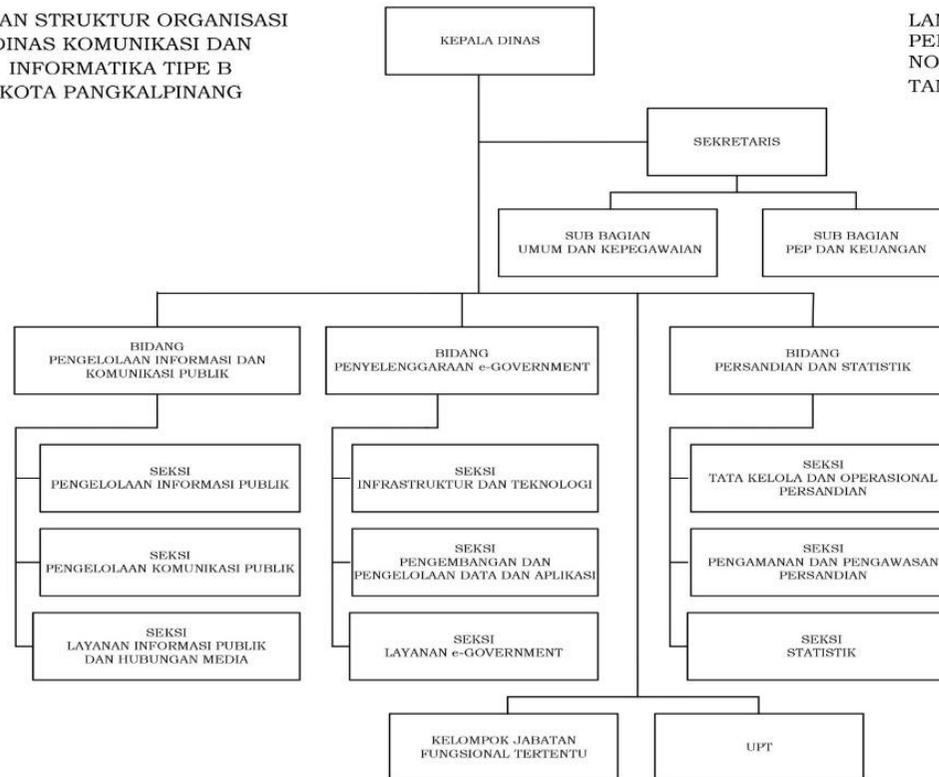
**16. Kepala Seksi Statistik** mempunyai tugas pengumpulan data dan penyediaan data statistik skala kota. Kepala Seksi Statistik mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Data dan Statistik.
- b. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik skala kota, pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi, penyelenggaraan statistic sektoral skala kota, pengembangan jejaring statistik khusus skala kota dan
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Data dan Statistik.



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA TIPE B  
KOTA PANGKALPINANG



LAMPIRAN XIII  
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TANGGAL 20 MARET 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

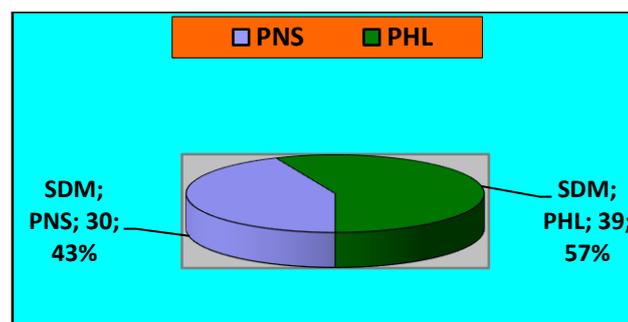
## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi tidak dapat diabaikan begitu saja. Sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Bahwa dalam rangka usaha mencapai visi dan misi suatu organisasi harus ditopang oleh sumber daya manusia yang berkemampuan unggul dan berkompeten sesuai dengan tugas fungsi pokok masing-masing. Selain itu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai disamping ketersediaan anggaran yang cukup.

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL). Dalam mengisi peran, tugas pokok, dan fungsi PNS yang belum terisi atau kekurangan jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika maka peran fungsi, dan tugas pokok tersebut diisi oleh Pegawai harian Lepas sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Pada tahun 2022 jumlah Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sejumlah 69 (enam puluh sembilan) orang, terdiri dari 30 orang PNS dan 39 orang PHL.

**Gambar 2.2**  
**Jumlah PNS dan PHL Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2022**

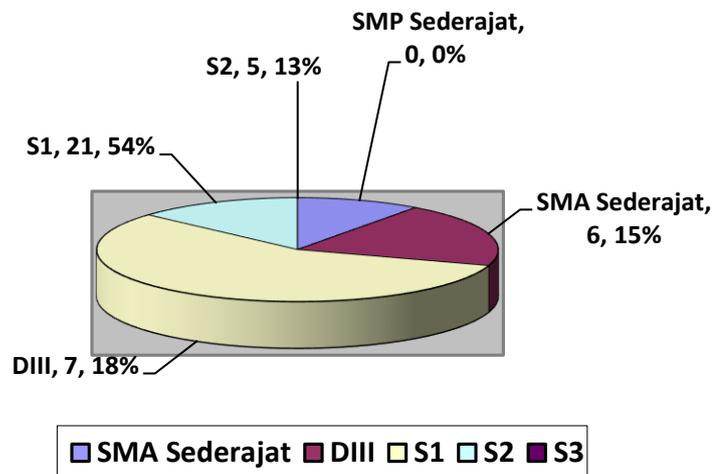


Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pangkalpinang telah dilakukan upaya untuk meningkatkan Sumber daya Manusia melalui Bimtek Teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi Pegawai Kominfo dan Pemilihan Pegawai Harian Lepas yang berkompeten. Selain itu terdapat beberapa pegawai yang terus meningkatkan jenjang pendidikannya baik untuk sarjana maupun pasca sarjana. Berdasarkan laporan Subbagian Kepegawaian dan Umum, tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang didominasi oleh lulusan Sarjana dan diikuti dengan lulusan Diploma III, SMA dan pasca sarjana yang dapat dilihat dilihat pada tabel 2.1.

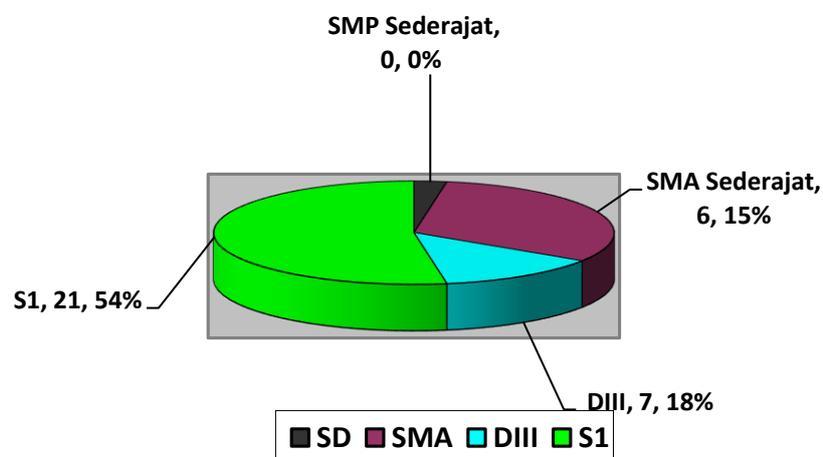
**Tabel 2.1**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatiak Kota Pangkalpinang Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PHL		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	1	2	8	4	16
4	D3	3	3	4	1	11
5	S1	8	9	10	10	37
6	S2	4	-	-	-	4
7	S3	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>						<b>69</b>

**Gambar 2.3**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**  
**Tahun 2022**



**Gambar 2.4**  
**Jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL) Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**  
**Tahun 2022**



Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 19 orang pada tahun 2022 seperti terlihat pada Tabel 2.2. berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**  
**Tahun 2022**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	4	7
2	Golongan III	9	10	19
3	Golongan IV	4	-	4

Berdasarkan analisis beban kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Analisis Beban Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**  
**Tahun 2022**

No	Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinas	0	1
2	Sekretaris	1	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1
4	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	0	1

No	Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
5	JFT Pranatan Komputer Terampil	1	1
6	JFT Analis Kebijakan Ahli Madya	1	1
7	JFT Pranata Komputer Ahli Muda	1	1
8	Pengelola Kepegawaian	0	1
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1
10	Pengadministrasi Umum	1	1
11	Analis Kebijakan Muda	1	1
12	<b>Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan</b>	1	1
13	Bendahara Pengeluaran	1	1
14	Pengelola Program dan Kegiatan	0	1
15	Pengelola Bahan Perencana	0	1
16	Analis Perencana, Evaluasi, dan Pelaporan	0	1
17	Pengadministrasi Keuangan	1	1
18	<b>Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	1	1
19	<b>Kasi Pengelolaan Informasi Publik</b>	1	1
20	Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi	0	1
21	Pengolah Informasi dan Komunikasi	0	1
22	Jurnalis	0	1
23	Analis Sistem Informasi dan Jaringan	1	1
24	<b>Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik</b>	1	1
25	Analis Publikasi	0	1
26	Pengelola Pengaduan Publik	0	1
27	Penata Liputan	1	1
28	<b>Kasi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media</b>	1	1
29	Analis Pelayanan Publik	0	1
30	Analais Penyuluhan dan Layanan	0	1
31	Pranata Humas Ahli Muda	2	2

No	Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
32	<b>Kabid Penyelenggaraan e-Government</b>	1	1
33	<b>Kasi Infrastruktur dan Teknologi</b>	1	1
34	Pengawas Teknologi Informasi	1	1
35	Pengawas Jaringan Utilitas	1	1
36	Pengelola Sistem dan Jaringan	0	1
37	<b>Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi</b>	1	1
38	Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten	0	1
39	Pengumpulan dan Pengolahan Data	0	1
40	Pelaksana/Calon Pranata Komputer	0	1
41	<b>Kasi Layanan e-Government</b>	1	1
42	Penyuluh Teknik Informatika	0	1
43	Pengelola Data Fasilitas Dukungan Pemerintah	0	1
44	JFT Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	1	1
45	JFT Pranata Komputer Ahli Muda	3	3
46	JFT Pranata Komputer Ahli Madya	1	1
47	Pengelola Jaringan	0	1
48	<b>Kabid Persandian dan Statistik</b>	1	1
49	<b>Kasi Tata Kelola dan Operasional Persandian</b>	1	1
50	JFT Sandiman	1	1
51	Penelaah Standar Telekomunikasi	0	1
52	Operator Sandi dan Telekomunikasi	0	1
53	Analisis Persandian	1	1
54	Pengadministrasi Umum	1	1
55	<b>Kasi Pengamanan dan Pengawasan Persandian</b>	1	1
56	Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi	0	1
57	Manggala Informatika Ahli Muda	1	1
58	JFT Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	1	1

No	Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
59	Kasi Statistik	1	1
60	Statistisi Ahli Muda	1	1
61	Analisis Statistik	1	1

**a. Sarana dan Prasarana Kantor**

Sarana dan Prasarana Kantor adalah dua hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor guna mencapai tujuan suatu organisasi. Dimana sarana merupakan fasilitas yang dapat dilihat serta digunakan oleh pegawai dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Secara umum sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Di dalam dunia perkantoran, segala kegiatan operasional yang bertujuan untuk keberhasilan kantor tentu sangat dipengaruhi oleh pegawainya. Disamping itu, salah satu motivasi tinggi pegawai dalam bekerja didukung oleh fasilitas yang tersedia di kantor. Untuk itu, guna mencapai tujuan organisasi, suatu kantor harus dapat menjamin dan menyediakan fasilitas yang menunjang keberhasilan pegawainya dalam bekerja. Karna jika suatu kantor hanya mengandalkan tenaga Pegawai saja tanpa di dukung dengan fasilitas yang memadai, tentu Pegawainya akan bekerja dengan kurang maksimal dan segala aktivitas kantor tidak dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, tujuan dari organisasi itu sendiri tidak tercapai.

Adapun Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 memiliki perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana Kantor**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**  
**Tahun 2022**

<b>Kode Barang</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Merk/Type</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>02.02.01.01.002</b>	Jeep	Nissan / Frontier 2.5 MT	Baik	1
<b>02.02.01.02.003</b>	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Suzuki Ertiga	Baik	1
<b>02.02.01.02.003</b>	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Honda / Mobilio DD4 1,5 RS M-CVT CKD	Baik	1
<b>02.02.01.04.001</b>	Sepeda Motor	YAMAHA	Baik	1
<b>02.02.01.04.006</b>	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	Yamaha / Jupiter Z-CW	Baik	1
<b>02.03.02.12.025</b>	Mesin Pompa air PMK	Shimizu / PS 150 BIT	Baik	1
<b>02.03.03.08.012</b>	Termometer Standar	Thermometer	Baik	1
<b>02.05.01.04.001</b>	Lemari Besi/Metal	Brother	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Brother	Kurang Baik	1
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	TOP / Cupboard-CBST	Baik	1
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Lion / L 33	Baik	2
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Brother / B203	Baik	6
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	BROTHER	Baik	2
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	BROTHER / B 203	Baik	6
02.05.01.04.002	Lemari Kayu	Lokal	Rusak Berat	2
02.05.01.04.002	Lemari Kayu	LION	Baik	1
02.05.01.04.002	Lemari Kayu	Expo / MTB 3090N	Baik	1
02.05.01.04.003	Rak Besi	IMW	Baik	1
	Rak Server	Wallmount Rack 19inch 5004S	Baik	
	Stabilizier	Stabilizier Time Lapse,track dan Panaroma support mode sport	Baik	

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Brother / B 103	Kurang Baik	1
02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Brother / B 104	Kurang Baik	1
02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Brother / B104	Baik	6
02.05.01.04.007	Brandkas	Ichiban	Rusak Berat	1
02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	Infinity / BLC-122-QT	Baik	1
02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	IBright	Baik	1
02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	Lokal / Full Triplek	Baik	1
02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	Lokal / Full Triplek	Baik	1
02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	Lokal / Triplek Hollow	Baik	1
02.05.01.05.081	Teralis	-	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.05.01.05.081	Teralis	-	Baik	7
02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	Goldtool / GTK-486B	Baik	1
02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	LOKAL	Baik	1
02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	rory	Kurang Baik	1
02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	ORBITRED	Baik	1
02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	EXPO	Baik	4
02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	w120xd60dxh75 equity	Baik	4
02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	w120xd60dxh75	Baik	1
02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Orbitrend / GST 1061	Baik	16
02.05.02.01.008	Meja Rapat	Expo / MPM 240	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.05.02.01.017	Meja Panjang	Lokal	Rusak Berat	2
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	olympic	Kurang Baik	2
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	solid	Rusak Berat	1
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	-	Baik	1
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	handmade	Rusak Berat	3
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	handmade	Rusak Berat	1
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	-	Kurang Baik	3
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	-	Baik	2
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	Lokal / Multiplek	Baik	3
02.05.02.01.030	Kursi Rapat	INDACHI / DCS21	Baik	20

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.05.02.01.030	Kursi Rapat	INDACHI / DCS21	Kurang Baik	3
02.05.02.01.030	Kursi Rapat	ergotec	Baik	13
02.05.02.01.030	Kursi Rapat	Ergotec / LX 807U	Baik	1
02.05.02.01.030	Kursi Rapat	FUTURA / FTR405	Baik	30
02.05.02.01.031	Kursi Tamu	Mores / 211	Baik	1
02.05.02.01.031	Kursi Tamu	MORRESS	Baik	1
02.05.02.01.032	Kursi Putar	donati	Rusak Berat	1
02.05.02.01.032	Kursi Putar	ergotec	Rusak Berat	1
02.05.02.01.035	Bangku Tunggu	GRESKO	Baik	2
02.05.02.01.036	Kursi Lipat	chitose	Rusak Berat	2
02.05.02.01.039	Meja Komputer	olympic	Rusak Berat	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.05.02.01.039	Meja Komputer	Lokal	Rusak Berat	1
02.05.02.02.001	Jam Mekanis	LOKAL	Baik	8
02.05.02.04.001	Lemari Es	SAMSUNG	Baik	1
02.05.02.04.003	A.C. Window	national	Kurang Baik	1
02.05.02.04.003	A.C. Window	tcl/tac12cs/tk / LG	Rusak Berat	1
02.05.02.04.003	A.C. Window	tcl/tac12cs/tk / LG	Kurang Baik	1
02.05.02.04.003	A.C. Window	LG	Kurang Baik	1
02.05.02.04.003	A.C. Window	panasonic	Baik	2
02.05.02.04.003	A.C. Window	panasonic	Baik	1
02.05.02.04.003	A.C. Window	mitsubishi / ac 1pkH10vc	Baik	1
02.05.02.04.003	A.C. Window	Daikin / RNE25JEV14	Baik	1
02.05.02.04.003	A.C. Window	Daikin / RNE50JEV14	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
<b>02.05.02.04.003</b>	A.C. Window	Daikin / FTNE50JEV14	Baik	3
<b>02.05.02.04.003</b>	A.C. Window	Daikin / FTNE50JEV14	Baik	1
<b>02.05.02.04.003</b>	A.C. Window	DAIKIN	Baik	4
<b>02.05.02.04.003</b>	A.C. Window	Panasonic	Baik	2
<b>02.05.02.04.003</b>	A.C. Window	Sharp	Baik	1
<b>02.05.02.04.006</b>	Kipas Angin	maspion	Kurang Baik	1
<b>02.05.02.04.006</b>	Kipas Angin	Regency / TW 20	Baik	1
<b>02.05.02.04.006</b>	Kipas Angin	Regency / TW 20	Baik	1
<b>02.05.02.04.006</b>	Kipas Angin	Regency / TW 20	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.05.02.04.006	Kipas Angin	Regency / TW 20	Baik	1
02.05.02.04.006	Kipas Angin	PANASONIC	Baik	4
02.05.02.05.026	Alat Dapur lainnya	POLYTRON	Baik	2
02.05.02.06.002	Televisi	PANASONIC	Baik	2
02.05.02.06.002	Televisi	SAMSUNG	Baik	1
02.05.02.06.002	Televisi	Layar 4K HDR / Andoid TV	Baik	1
02.05.02.06.008	Sound System	Aubern / BE 12 CX	Baik	1
02.05.02.06.018	Unit Power Supply	-	Baik	1
02.05.02.06.021	Camera Video	Sony / DSC-H400	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.05.02.06.021	Camera Video	Canon / Power Shot SX60	Baik	1
02.05.02.06.021	Camera Video	CANON	Baik	1
02.05.02.06.028	Lambang Garuda Pancasila	LOKAL	Baik	1
02.05.02.06.029	Gambar Presiden/Wakil Presiden	LOKAL	Baik	4
02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	Lokal / Teleskopik Aluminium	Baik	1
02.05.02.06.038	Dispenser	Polytron / PWC 777	Baik	1
02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	LOKAL	Baik	4
02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	LOKAL	Baik	5
02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	LOKAL	Baik	1
02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	LOKAL	Baik	1
02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	Rusak Berat	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	-	Baik	2
02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	indachi	Kurang Baik	2
02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	ERGOTEX	Baik	1
02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	ERGOTEK	Baik	3
02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	-	Baik	2
02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	ergotec / putar	Baik	4
02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	ergotec putar	Baik	1
02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	ergotec putar	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
<b>02.05.03.03.001</b>	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Ergosit / Iso	Baik	16
<b>02.05.03.07.006</b>	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	-	Baik	1
<b>02.06.01.01.048</b>	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink / Pro 700SFC	Baik	1
<b>02.06.01.01.048</b>	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink / Pro 700SFC	Baik	1
<b>02.06.01.01.048</b>	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink / Pro 700SFC	Baik	1
<b>02.06.01.01.048</b>	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink / Pro 700SFC	Baik	1
<b>02.06.01.01.048</b>	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink / Pro 700SFC	Baik	1
<b>02.06.01.01.048</b>	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / CT 1682B	Baik	1
<b>02.06.01.01.048</b>	Uninterruptible Power Supply (UPS)	SMART UPS	Baik	2

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
<b>02.06.01.01.048</b>	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	Baik	2
<b>02.06.01.01.048</b>	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Battery Pack / Smart-UPS SRT 72v 2.2KV,2.2KVA,RM	Baik	1
<b>02.06.01.01.075</b>	Digital Audio Taperecorder	Sony / ICD-PX470	Baik	1
<b>02.06.01.01.096</b>	peralatan studio audio lainnya (dst)	Drone Zerotech / Dobby Pocket Selfie	Baik	1
<b>02.06.01.01.096</b>	peralatan studio audio lainnya (dst)	DJI MAVIC	Baik	1
<b>02.06.01.01.096</b>	peralatan studio audio lainnya (dst)	Logitech	Baik	2
<b>06.5.2.02.06.01.02</b>	peralatan studio audio lainnya (dst)	Kamera Mirrorless +Lensa Fix 50mm 24.3 Megapixel,3.0 Titable TFT LCD Full HD,Wi-fi and NFC	Baik	1
<b>06.5.2.02.06.01.02</b>	peralatan studio audio lainnya (dst)	LENS FE24-240 MMF3.5-6.3E-Mount	Baik	1
<b>06.5.2.02.06.01.02</b>	peralatan studio audio lainnya (dst)	Memory Kamera, memory card extreme Pro 128 GB	Baik	1
<b>06.5.2.02.06.01.02</b>	peralatan studio audio lainnya (dst)	VideoMic,Lightweight at only 2.6 ounces,rycote lyre suspension system	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
06.5.2.02.06.01.02	peralatan studio audio lainnya (dst)	Tripod Lite Tripod, load capacity: 2.5 Kg Maximum Height:1440mm Minimum height:457mm	Baik	1
06.5.2.02.06.01.02	peralatan studio audio lainnya (dst)	Wireless point Kapasitas 200 User	Baik	80
02.06.01.02.003	Camera Electronic	sony / DSCTX10	Baik	1
02.06.01.02.003	Camera Electronic	canon / EOS1200DKIT	Baik	1
02.06.01.02.003	Camera Electronic	Sony / HDR-PJ410	Baik	1
02.06.01.02.003	Camera Electronic	Logitech	Baik	2
02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	Toshiba / NPX15A	Baik	1
02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	Panasonic / KX-FP701	Baik	1
02.06.02.01.004	Telephone Mobile	Xiaomi Note 9 Pro	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.10.01.01.008	Komputer Jaringan lainnya	HP Enterprise / HPEDL120	Baik	1
02.10.01.02.001	P.C Unit	-	Baik	1
02.10.01.02.001	P.C Unit	HP Pavilion / S51120D	Baik	2
02.10.01.02.001	P.C Unit	Asus / K31AM-J-D006T	Baik	1
02.10.01.02.001	P.C Unit	Asus / K31AM-J-D006T	Baik	1
02.10.01.02.001	P.C Unit	Asus / K31AM-J-D006T	Baik	1
02.10.01.02.001	P.C Unit	Asus / K31AM-J-D006T	Baik	1
02.10.01.02.001	P.C Unit	Asus / K31AM-J-D006T	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS AIO	Baik	3
02.10.01.02.001	P.C Unit	HP AIO 205	Baik	8
02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS	Baik	1
02.10.01.02.001	P.C Unit	-	Baik	1
02.10.01.02.001	P.C Unit	xiomi / pc deskop rakitan	Baik	2
02.10.01.02.001	P.C Unit	Prosesor AMD	Baik	2
02.10.01.02.001	Komputer	-	Baik	1
02.10.01.02.002	Lap Top	-	Baik	1
02.10.01.02.001	Komputer		Baik	1
02.10.01.02.002	Lap Top	-	Baik	3
02.10.01.02.002	Lap Top	TOSHIBA	Baik	1
02.10.01.02.002	Lap Top	Lenovo / P110-EKN01LV006	Baik	1
02.10.01.02.002	Lap Top	Lenovo / P110-EKN01LV006	Baik	1
02.10.01.02.002	Lap Top	Lenovo / P110-EKN01LV006	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.10.01.02.002	Lap Top	Lenovo / P110-EKN01LV006	Baik	1
02.10.01.02.002	Lap Top	Lenovo / P110-EKN01LV006	Baik	1
02.10.01.02.002	Lap Top	HP / 14-bs745TU	Baik	2
02.10.01.02.002	Lap Top	Lenovo / Ideapad IP320-14AST	Baik	2
02.10.01.02.002	Lap Top	ASUS / VIVO BOOK FLIP	Baik	1
02.10.01.02.002	Lap Top	IP 3305	Baik	2
02.10.01.02.002	Lap Top	LENOVO	Baik	2
02.10.01.02.002	Lap Top	ASUS	Baik	3

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.10.01.02.002	Lap Top	LENOVO V330	Baik	1
02.10.01.02.002	Lap Top	HP	Baik	1
02.10.01.02.002	Lap Top	xiami / Prosesor: CoreTM i7-8750H	Baik	1
02.10.01.02.002	Lap Top	HPs / DISPLAY: 14,0- INCH DIAGONAL	Baik	1
02.10.01.02.003	Note Book	ASUS / X450JN- wx022d	Baik	1
02.10.01.02.003	Note Book	ASUS	Baik	4
02.10.02.01.012	Hard Disk	-	Baik	1
02.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Plustek SmartOffice / PL2550	Baik	1
02.10.02.02.016	Speaker Komputer	Simbadda / CST 5100N	Baik	1
02.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	1
02.10.02.03.002	Monitor	Samsung / UA50MU6100	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson / L210	Baik	1
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L360	Baik	1
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Ip 2770	Baik	4
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L360	Baik	1
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L360	Baik	3
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L120	Baik	7
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASER JET PRO	Baik	4
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASET JET PRO	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	LASET JET	Baik	1
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON M200	Baik	1
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3110	Baik	1
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / print, scan, copy ( tanpa fitur wifi direct)	Baik	3
02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	PLUSTEK / Resolusi & sensor : 600 dpi, CISx2 (Duplex)	Baik	1
02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	seagate Backup Slim USB 3.0 11B	Baik	1
02.10.02.04.001	Server	proliant / ML 350G6-180	Baik	1
02.10.02.04.001	Server	xeon Hp prolink / DL320EG8-421	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.10.02.04.001	Server	-	Baik	2
02.10.02.04.002	Router	Mikrotik Router Board / CCR1036-12G-4S-EM	Baik	1
02.10.02.04.002	Router	MAX POWER CONSUMPTION 40W / PROCESSOR DUAL-CORE 1 GHz	Baik	3
02.10.02.04.002	Router	LAN Ports 10 Gigabits / Main Storage/NAND 128MB	Baik	1
03.5.2.02.10.02.04	a. Akses point kapasitas 700 user Kode tender 2975096 (Ruijie Type: RG-AP730L+PoE)	-	Baik	6
03.5.2.02.10.02.04	Cloud Router Mikrotik, Router board CCR 1036-12G-4s	-	Baik	1
03.5.2.02.10.02.04	Router ARM Mikrotik,Routerbord 2011UIAS-RM	-	Baik	11
03.5.2.02.10.02.04	Router MIPS-BE, Mikrotik Routerboard 2011UIAS-RM	-	Baik	80
03.5.2.02.10.02.04	Switch GIGABIT 24 PORTS RUIJIEb RG ES22GC 26 Port	-	Baik	4
03.5.2.2.10.02.04	Smart Switch	-	Baik	1
02.10.02.04.003	Hub	LYNKSYS	Kurang Baik	1
02.10.02.04.004	Modem	GSM / 4x4 MIMO LITE	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.10.02.04.004	Modem	Up to 15 Mbps / Internet	Baik	3
02.10.02.04.004	Modem	Up to 50Mbps / Router All Operator	Baik	1
02.10.02.04.014	Rak Server	4U epth 45 cm / Include PDU 6 Lubang	Baik	4
02.10.02.04.021	Kabel UTP	-	Baik	4
02.10.02.04.023	Wireless Access Point	Prolink / Prolink 4G LTE Mifi Modem	Baik	3
02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	TL-SG2452T-Link	Baik	1
02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	Netgear / A6100	Baik	5
02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	SANEX	Baik	2

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	-	Baik	1
02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	TP-Link Switch / TL-SG1048	Baik	1
02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	FortiNet / FortiGate60E	Baik	1
02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	NiRax / 11036 Close Rack	Baik	1
02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	AP Up 500 Clients / Indoor Ceiling /Wall-mounting	Baik	1
02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	Number Of Outlets / 24.0, Include 5 Module	Baik	1
02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	SFP ports (non-combo) / 24 ports 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+)4gb	Baik	1
02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	AP Up 200 clients / Max Thoughtput	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
		1167Mbps, 2x Spatial Streams		
<b>02.10.02.05.001</b>	Peralatan Komputer lainnya	Operating System Router OS Level / Main Storage/NAND 128MB	Baik	1
<b>02.10.02.05.001</b>	Peralatan Komputer lainnya	Memory Kit / 32GB (4x8GB) 2Rx8 PC3-12800e	Baik	1
<b>02.10.02.05.001</b>	Peralatan Komputer lainnya	-	Baik	1
<b>03.01.01.01.001</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Baik	1
<b>03.01.01.01.005</b>	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	Baik	1
<b>03.01.01.01.005</b>	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	Baik	1
<b>03.01.01.14.004</b>	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	-	Baik	1
<b>03.01.01.32.005</b>	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	-	Baik	1

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
03.01.01.32.005	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	-	Baik	1
04.04.02.03.001	Jaringan listrik lainnya	-	Baik	1
04.04.02.03.001	Jaringan listrik lainnya	-	Baik	1
04.04.03.05.001	Jaringan telepon lainnya	-	Baik	1
04.04.03.05.001	Jaringan telepon lainnya	-	Baik	1
04.04.03.05.001	Jaringan telepon lainnya	-	Baik	1
04.04.03.05.001	Jaringan telepon lainnya	-	Baik	1
04.04.03.05.001	Jaringan telepon lainnya	-	Baik	1
04.04.03.05.001	Jaringan telepon lainnya	-	Baik	1

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditandari melalui pengembangan komunikasi, informatika, media massa, serta peningkatan SDM di bidang komunikasi dan informatika.

Percepatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang telah dilakukan oleh Kota Pangkalpinang beberapa diantaranya adalah diijinkannya 100 BTS dari tahun 2018 hingga 2020 guna mendukung kualitas jaringan telekomunikasi di Kota Pangkalpinang. Selain itu, cakupan layanan komunikasi juga menunjukkan capaian yang sangat baik setiap tahunnya yaitu 100% pada tahun 2018 hingga 2020. Cakupan layanan komunikasi yang baik kemudian juga didukung dengan presentase pengaduan informasi publik yang terus dapat ditangani 100% setiap tahunnya di Kota Pangkalpinang.

Pembangunan urusan komunikasi dan informatika juga dilakukan di lingkungan perangkat daerah yaitu dengan pembuatan dan penggunaan website. Tujuan pembangunan website bagi perangkat daerah adalah untuk mempermudah komunikasi antar lembaga dengan masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang berusaha menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 telah terdapat 10 perangkat daerah yang telah memiliki website dan aktif **melakukan update, jumlahnya meningkat hingga pada tahun 2020 terdapat 10 perangkat daerah yang telah memiliki dan aktif menggunakan website.**

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tentunya perlu didukung oleh SDM yang mumpuni dalam bidang TIK. Kota Pangkalpinang melakukan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi di Tingkat Kecamatan. Berdasarkan data, terlihat adanya peningkatan setiap tahunnya untuk pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dimana pada tahun 2013 belum terdapat

adanya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi kemudian pada tahun 2017 menjadi 43%. Selanjutnya, SDM yang telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK di Kota Pangkalpinang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat baik hingga pada tahun 2020 telah mencapai 100%.

Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah surat kabar dan jumlah penyiaran radio/TV yang terdapat di Kota Pangkalpinang terlihat masih pada angka yang stagnan atau tidak ada perubahan. Kemudian untuk jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi di Kota Pangkalpinang dapat dilakukan dengan lima media yaitu melalui media massa (majalah, radio, dan televisi); media baru (website, online); media tradisional (pertunjukan seni); media interpersonal (sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya); media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho). Berdasarkan data setiap tahunnya terdapat adanya peningkatan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi melalui berbagai media, dan media yang paling banyak digunakan adalah media baru seperti website atau media online karena dinilai lebih efisien dan mudah dalam penyalurannya kepada masyarakat.

Presentase penduduk yang menggunakan HP atau telepon di Kota Pangkalpinang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 terlihat bahwa terdapat 45% penduduk yang telah menggunakan HP atau telepon, kemudian meningkat menjadi 80% pada tahun 2017. Hal tersebut sejalan dengan proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet yang terus meningkat dari 20% pada tahun 2013 menjadi 60% pada tahun 2017 dan pada tahun 2020 sebesar 100%. Hal tersebut didukung dengan rasio sarana dan prasarana komunikasi yang terus menunjukkan peningkatan diantaranya, jumlah provider telekomunikasi, serta jumlah jaringan komunikasi yang terdapat di Kota Pangkalpinang. Selain itu, pameran dan expo juga dilaksanakan satu kali setiap tahunnya guna mendukung pembangunan komunikasi dan informatika di Kota Pangkalpinang.



**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**  
**Tahun 2018-2020**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun ke-			Ket.
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	Persentase BTS yang memiliki ijin dan perpanjangan	*	*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%
2	Website Perangkat Daerah	*	*	5	5	5	5	5	5	100	100	100	Website
3	Website PD yang aktif	*	*	5	5	5	5	5	5	100	100	100	Website
4	Jumlah surat kabar nasional/ local	*	*	6	6	6	6	6	6	100	100	100	
5	Jumlah penyiaran radio/ TV	*	*	7	7	7	7	7	7	100	100	100	Radio/TV
6	Persentase PD Pelayanan Publik yang memiliki portal website	*	*	0	0	1	0	0	1	100	100	100	%
7	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	*	*	0	0	14	0	0	14	100	100	100	%
8	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK	*	*	80	80	80	80	80	80	100	100	100	%
9	Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui :	*	*							100	100	100	100

	<b>- Media massa seperti majalah, radio dan televisi</b>	*	*	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	%
	- Media baru seperti website (media online)	*	*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%
	- Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	*	*	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	%
	- Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi dan lokakarya	*	*	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	%
	- Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spaduk dan baliho	*	*	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	%
<b>10</b>	Persentase pengaduan informasi publik yang tertangani	*	*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%
<b>11</b>	Cakupan layanan telekomunikasi	*	*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%
<b>12</b>	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	*	*	45	60	70	45	60	70	100	100	100	100	%
<b>13</b>	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet	*	*	20	30	50	20	30	50	100	100	100	100	%
<b>14</b>	Jumlah Provider Telekomunikasi Yang Ada di Pangkalpinang	*	*	5	5	6	5	5	6	100	100	100	100	Jumlah
<b>15</b>	Jumlah Jaringan Komunikasi	*	*	5	5	6	5	5	6	100	100	100	100	Jumlah
<b>16</b>	Pameran/expo	*	*	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	Jumlah

**Tabel 2.6.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2020**

Uraian	Anggaran Pada tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran 2017-2020	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.568.655.256</b>	<b>4.894,043,446,88</b>	<b>5.565.110.108</b>	<b>4.553.437.721,00</b>	<b>84.72%</b>	<b>93.04%</b>	404.006.251.37	450.624.686.33
<b>Belanja Tak Langsung</b>	2.912.580.836	2.929.222.268,88	2.638.381.770	2.885.340.854,00	90.59%	98.50%	72.753.618.04	37.376
- Belanja Pegawai	2.912.580.836	2.929.222.268,88	2.638.381.770	2.885.340.854,00	90.59%	98.50%	72.753.618.04	37.376
							-	-
<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.656.074.420</b>	<b>1.964.821.178,00</b>	<b>2.926.728.338</b>	<b>1.668.096.867,00</b>	<b>80.05%</b>	<b>84.90%</b>	<b>635.604.687.33</b>	<b>450.587.310.33</b>
- Belanja Pegawai	697.312.744	211.175.000,00	629.109.744	177.935.000,00	90,22%	84.26%	284.342.566.67	134.929.612.67
- Belanja Barang Jasa	2.435.386.676	1.643.076.008,00	1.834.921.150	1.380.474.867,00	75.34%	84.02%	255.230.110.67	158.913.104.33
- Belanja Modal	523.375.000	110.570.170,00	462.697.444	109.687.000,00	88,41%	99.20%	165.720.010	156.744.593.33

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

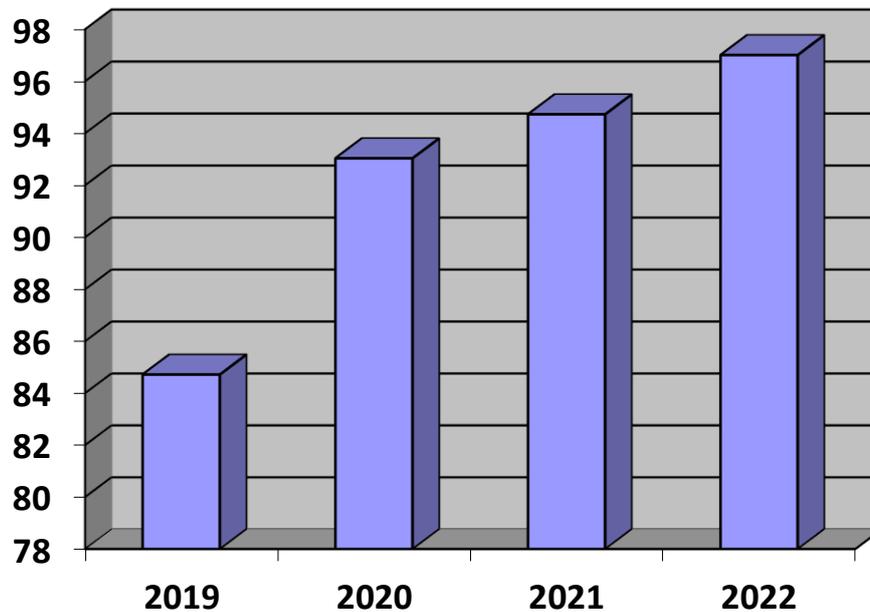
**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2022**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Pertumbuhan Anggaran 2021-2022	Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>5.567.272.920</b>	<b>12.625.836.932</b>	<b>5.273.601.042</b>	<b>12.248.030.522</b>	<b>94,73%</b>	<b>97,01%</b>	7.058.564.012	6.974.429.480
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.956.315.870	4.601.276.932	3.714.993.774	4.487.764.973	93,90%	97,53%	644.961.062	772.771.199
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	465.329.650	5.252.707.000	430.666.338	5.142.373.498	92,55%	97,90%	4.787.377.350	4.711.707.160
Program Aplikasi Informatika	1.145.627.400	2.771.853.000	1.127.940.930	2.617.892.051	98,46%	94,45%	1.626.225.600	1.489.951.121
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>272.107.350</b>	<b>55.793.600</b>	<b>211.676.145</b>	<b>54.200.000</b>	<b>77,79%</b>	<b>97,14%</b>	<b>(216.313.750)</b>	<b>(157.476.145)</b>
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	272.107.350	55.793.600	211.676.145	54.200.000	77,79%	97,14%	(216.313.750)	(157.476.145)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>33.760.330</b>	<b>100.253.800</b>	<b>25.445.000</b>	<b>91.417.500</b>	<b>75,37%</b>	<b>91,19%</b>	<b>66.493.470</b>	<b>65.972.500</b>



<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	33.760.330	100.253.800	25.445.000	91.417.500	75,37%	91,19%	66.493.470	65.972.500
--	------------	-------------	------------	------------	--------	--------	------------	------------

**Gambar 2.5.**  
**Persentasi Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota**  
**Pangkalpinang Tahun 2019 - 2022**



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### a. Tantangan (Threats)

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Perubahan ekonomi pasca-pandemi berdampak pada perencanaan dan penganggaran;
- Stabilitas keamanan nasional, penguatan ketahanan dan keamanan siber, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi;
- Tingkat literasi digital penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK, keterbukaan informasi publik, keamanan informasi elektronik dan non elektronik serta satu data Indonesia yang masih rendah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pada tahun-tahun mendatang yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :

##### **a. Permasalahan terkait Sekretariat**

- Pola Pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang professional, bersih dan melayani;
- Standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur belum sepenuhnya diidentifikasi dan dijadikan pedoman operasional dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan public;
- Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur gedung, peralatan dan perlengkapan kantor.

**b. Permasalahan terkait Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

- Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sinkronisasi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk semua konten informasi yang harus sampai ke masyarakat, konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi;
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, informasi yang jelas dan seragam dari pusat hingga daerah;
- Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan public, Penguatan koordinasi serta pelibatan lembaga, media dan kelompok informasi masyarakat.

**c. Permasalahan terkait Bidang Penyelenggaraan e-Government**

- Menghubungkan semua perangkat daerah di jaringan intra pemerintah daerah;
- Mengintegrasikan layanan public dan layanan administrasi dengan system penghubung layanan pemerintah daerah;
- Memperkuat infrastruktur TIK untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, transformasi pelayanan public.

**d. Permasalahan terkait Bidang Persandian dan Statistik**

- Pemenuhan kelayakan operasional dan keamanan komunikasi pemerintahan daerah;
- Pengamanan informasi elektronik dan non elektronik;
- Pemanfaatan sertifikat elektronik;
- Kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data dengan prinsip satu data Indonesia;

- Kemudahan akses data, penyebarluasan data dan metadata di portal satu data Indonesia;
- Penguatan kelembagaan, pembentukan forum data dan penguatan regulasi urusan statistic.
- Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal dimana Perlunya peningkatan integrasi data, peningkatan kapasitas pengelola data sektoral, peningkatan kemudahan akses publik terhadap data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government.

**e. Identifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Saat ini perkembangan digitalisasi khususnya pada pemerintahan masih dalam tahap awal pelaksanaan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang tercantum padam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi di pemerintahan menjadi lebih terarah dan terencana. Salah satu permasalahan pada digitalisasi pemerintahan adalah sistem dan data pemerintah pusat dan daerah yang sebagian masih analog, dan sebagian lainnya terdigitalisasi tetapi belum terintegrasi satu sama lain. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga merupakan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat integrasi data seluruh instansi pusat dan daerah dan untuk mendukung itu semua Infrastruktur TIK harus kuat dan memadai.

Perekembangan digitalisasi sangat berpengaruh dalam penyebarluasan informasi, karena informasi pada zaman ini tersebar dengan cepat. Penyediaan informasi dari pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan strategi komunikasi sehingga tidak tersebar informasi hoaks.

### **3.2. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencn Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan prioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastutur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2019-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan peerintah indonesia tahun 2019-2024 antara lain sebagai berikut :

1. Masih tingginya kesenjangan digital wilayah indonesia
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah indonesia dengan jaringan infrastuktur pitalebar (Palapa Ring)
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan
5. Interolensasi dan krisis kepribadian bangsa

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi focus pembangunan bidang komunikasi dan informatika yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika anatara lain :

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman ;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian focus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2019-2024 disusun dengan 4 (empat) fokus utama, yaitu :

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik

### **3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung**

Tujuan pembangunan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung selama periode tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata Kelola berbasis elektronik

Sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung yang akan dicapai selama periode tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;
2. Termanfaatkannya data dan informasi statistik sectoral;
3. Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<b>Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi pemerintah provinsi untuk pelayanan administrasi pemerintahan dan public yang terintegrasi;</b>	Integrasi layanan administrasi pemerintahan dan public belum optimal	Belum adanya penerapan manajemen SPBE untuk pengintegrasian layanan administrasi pemerintah dan publik	Sudah adanya layanan system penghubung layanan pemerintah (SPLP)
<b>Termanfaatkannya data dan informasi statistic sektoral</b>	Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal dimana Perlunya peningkatan integrasi data, peningkatan kapasitas pengelola data sektoral, peningkatan kemudahan akses publik terhadap data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government.	Belum adanya Peraturan daerah tentang satu data kota pangkalpinang	Sudah ada aplikasi portal Satu data Indonesia Kota Pangkalpinang

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<b>Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE</b>	Belum adanya pengamanan aplikasi pemerintah kota pangkalpinang	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang belum memadai dan kurangnya fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah	Sudah tersusunnya masterplan smart city daerah kota pangkalpinang untuk mendukung pelaksanaan SPBE

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030, Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi terdiri atas :

Pengembangan jaringan terestrial melalui sistem jaringan serat optik.

1. Pengembangan jaringan satelit berupa penyediaan ruang untuk menara telekomunikasi (base transceiver station (BTS) bersama yang diarahkan di: sekitar hutan kota yang terdapat di Kecamatan Gerunggang; dan menara yang menyatu dengan menara fasilitas umum.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan informatika berdasarkan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi diatas diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan jaringan terestrial melalui sistem jaringan serat optik.</li> <li>• Pengembangan jaringan satelit berupa penyediaan ruang untuk menara telekomunikasi (base transceiver station (BTS) bersama</li> </ul>	Jaringan intra pemerintah daerah belum optimal.	Efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa dimensi yang belum optimal.	Agenda prioritas nasional RPJMN 2020-2024, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari perkembangan permasalahan yang mempertimbangkan faktor penghambat dan pendorong yang ada maka disusunlah isu-isu strategis Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- Sinkronisasi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk semua konten informasi yang harus sampai ke masyarakat terkait dengan program dan kebijakan pemerintah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi;

- b. Penguatan koordinasi serta pelibatan kelompok informasi masyarakat.
- c. Menghubungkan semua perangkat daerah di jaringan intra pemerintah daerah;
- d. Mengintegrasikan layanan public dan layanan administrasi dengan system penghubung layanan pemerintah daerah;
- e. Ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang memadai untuk keamanan informasi
- f. Memanfaatkan sertifikat elektronik;
- g. Peraturan mengenai portal satu data Indonesia pangkalpinang;
- h. Kompilasi data administrasi secara independen agar tersedia data sektoral;

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan startegi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

### 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam table 4.1 perubahan sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
					Tahun 2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	-	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Permenpan No. 5 Tahun 2018	Indeks	NA	2,6	2,8	3
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	Persentase data dan informasi penyelenggaraan pemerintah yang dikomunikasikan/didesiminasikan dengan baik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo terkait penyampaian data dan informasi penyelenggaraan tahun berkenaan/jumlah kegiatan terkait penyampaian data dan informasi yang direncanakan dalam	Persen	NA	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran			
					Tahun 2023	2024	2025	2026	
			renja tahun berkenaan x 100%						
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan sistem IT dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik/jumlah perangkat daerah x 100%	Persen	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan layanan dan data statistik sektoral.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	Jumlah Perangkat daerah yang telah mengumpulkan, mengupdate dan memanfaatkan website data	Persen	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
					Tahun 2023	2024	2025	2026
			statistik daerah terpadu ( <a href="https://data.pangkalpinangkota.go.id">https://data.pangkalpinangkota.go.id</a> ) dalam menyusun perencanaan dan evaluasi dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%					

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan saran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Induk SPBE
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan public
3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya dan Infrastruktur TIK
4. Meningkatkan Aplikasi layanan public yang terintegrasi
5. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi public melalui penguatan koordinasi dan Kerjasama, serta pelibatan kelompok informasi masyarakat
6. Meningkatkan Koordinasi Pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistic sectoral
7. Membangun Metadata statistic sectoral
8. Penguatan pengamanan infrastruktur siber dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah

#### **5.2 Arah Kebijakan**

1. Pembangunan Pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi Informasi
2. Peningkatan layanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan public.
3. Penguatan data Statistik sectoral sebagai upaya mewujudkan satu data Indonesia (SDI)
4. Pengamanan Sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.				
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik menuju tercapainya good governance	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik berbasis IT	Akselerasi reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi</li> <li>2. Peningkatan layanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan public.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> <li>2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</li> <li>3. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</li> </ol>
Meningkatkan Nilai Indeks SPBE	Meningkatnya Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Induk SPBE</li> </ol>	Pembangunan Pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan</li> </ol>	Pembangunan Pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.				
		dan pelayanan public		
		3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya dan Infrastruktur TIK	Pembangunan Pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
		4. Meningkatkan Aplikasi layanan public yang terintegrasi	Pembangunan Pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
		5. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi public melalui penguatan koordinasi dan Kerjasama, serta pelibatan kelompok informasi masyarakat	Peningkatan layanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan public.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		6. Meningkatkan Koordinasi Pengumpulan, pengolahan	Penguatan data Statistik sectoral sebagai upaya	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.				
		analisis dan diseminasi data statistic sectoral	mewujudkan satu data Indonesia (SDI)	
		7. Membangun Metadata statistic sectoral	Penguatan data Statistik sectoral sebagai upaya mewujudkan satu data Indonesia (SDI)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		8. Penguatan pengamanan infrastruktur siber dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Pengamanan Sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sebagai perrwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan startegis, maka Langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama tiga tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indicator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Infromatika Kota Pangkalpinang sesuai dengan pendanaan indikatif Tahun 2024 – 2026, maka ditetapkan kegiatan untuk belanja langsung adalah sebagai berikut :

#### **✚ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tujuan ASN
  - b. Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi
  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan bahan Logistik Kantor
    - d. Penyediaan Barang dan cetakan dan penggandaan
    - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Pengadaan Mebel
  5. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya.

#### **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
  - b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
  - c. Pelayanan Informasi Publik
  - d. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

#### **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

1. Pengelolaan Nam Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - b. Penyeenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penataklaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Sikronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik
  - c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
  - d. Koordinasi dan sikronisasi Sistem Keamanan Informasi
  - e. Koordinasi dan Sikronisasi Data dan Informasi Elektronik

- f. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- g. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- h. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

#### **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

- 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
  - b. Membangun Metadata Statistik Sektoral

#### **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

- 1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
  - a. Penetapan kebijakan tata Kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota
  - b. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik
- 2. Penetapan pola Hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota
  - a. Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**  
**Tahun 2024 – 2026**

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,16,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:NILAI)	77.81	77.86	5,201,032,612	77.91	5,289,782,517	77.96	5,251,031,612	77.96	15,741,846,741	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:NILAI)	NA	75		76		77		77		KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	3,891,116,799	100	3,891,116,799	100	3,941,115,799	100	11,723,349,397	SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	30	33	3,888,116,799	33	3,888,116,799	33	3,938,115,799	33	11,714,349,397	SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	3,000,000	SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	3,000,000	SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)										
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	3,000,000	SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penurunan tingkat pelanggaran disiplin (Dengan Satuan:%)</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>50,000,000</b>	<b>30</b>	<b>138,749,905</b>	<b>40</b>	<b>50,000,000</b>	<b>40</b>	<b>238,749,905</b>	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dengan Satuan:Paket)	0		-	70	88,749,905		0	70	88,749,905	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	150,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>405,009,480</b>	<b>100</b>	<b>405,009,480</b>	<b>100</b>	<b>405,009,480</b>	<b>100</b>	<b>1,215,028,440</b>	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	5,303,000	1	5,303,000	1	5,303,000	1	15,909,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	161,730,000	1	161,730,000	1	161,730,000	1	485,190,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	43,000,580	1	43,000,580	1	43,000,580	1	129,001,740	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	16,375,900	1	16,375,900	1	16,375,900	1	49,127,700	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	730	360	3,600,000	360	3,600,000	360	3,600,000	1140	10,800,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	175,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	1	525,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Peresentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100</b>	<b>120,000,000</b>	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)			-		0		0		0	-
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	5	40,000,000	5	40,000,000	10	40,000,000	13	120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>444,378,712</b>	<b>100</b>	<b>444,378,712</b>	<b>100</b>	<b>444,378,712</b>	<b>100</b>	<b>1,333,136,136</b>	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	70,865,088	1	70,865,088	1	70,865,088	1	212,595,264	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	192,180,000	1	192,180,000	1	192,180,000	1	576,540,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	9,944,500	1	9,944,500	1	9,944,500	1	29,833,500	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	171,389,124	1	171,389,124	1	171,389,124	1	514,167,372	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>370,527,621</b>	<b>100</b>	<b>370,527,621</b>	<b>100</b>	<b>370,527,621</b>	<b>100</b>	<b>1,111,582,863</b>	<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	3	121,629,000	3	121,629,000	3	121,629,000	3	364,887,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	2	234,620,496	2	234,620,496	2	234,620,496	2	703,861,488	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	1	14,278,125	1	14,278,125	1	14,278,125	1	42,834,375	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2,16,02	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	100	3,609,465,960	100	3,684,465,960	100	3,759,465,960	100	11,053,397,880	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) (Dengan Satuan:%)	100	100	3,609,465,960	100	3,684,465,960	100	3,759,465,960	100	11,053,397,880	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	69,990,192	1	94,990,192	1	119,990,192	1	284,970,576	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	3,115,150,480	1	3,090,150,480	1	3,090,150,480	1	9,295,451,440	SUB KOORDINATOR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	374,325,288	1	399,325,288	1	424,325,288	1	1,197,975,864	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	5	50,000,000	10	100,000,000	12	125,000,000	27	275,000,000	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2,16,03	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)	NA	100	4,334,289,300	100	4,409,289,300	100	4,469,897,751	100	13,213,476,351	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN E-GOVERNMENT
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)	00	50	2,562,333,392	70	2,562,333,392	90	2,562,333,392	90	7,687,000,176	SUB KOORDINATOR LAYANAN E-GOVERNMENT
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	62,333,392	1	62,333,392	1	62,333,392	3	187,000,176	SUB KOORDINATOR LAYANAN E-GOVERNMENT
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Unit)	49	67	2,500,000,000	67	2,500,000,000	67	2,500,000,000	97	7,500,000,000	SUB KOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan E-Government (Administrasi Pemerintahan dan Publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:%)	0	25	1,771,955,908	50	1,846,955,908	75	1,907,564,359	75	5,526,476,175	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	50,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	3	275,000,000	SUB KOORDINATOR LAYANAN E-GOVERNMENT

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	49,499,800	1	49,499,800	1	49,499,800	2	148,499,400	SUB KOORDINATOR LAYANAN E-GOVERNMENT
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Dengan Satuan:Unit)	0	1	324,133,392	1	324,133,392	1	324,133,392	1	972,400,176	SUB KOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	49,994,750	1	49,994,750	1	49,994,750	3	149,984,250	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	5	49,994,750	10	49,994,750	15	49,994,750	15	149,984,250	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Dengan Satuan:Unit)	0	2	289,206,536	4	289,206,536	6	289,206,536	6	867,619,608	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Layanan)	0	1	579,573,184	1	604,573,184	1	640,181,635	3	1,824,328,003	SUB KOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	329,553,496	1	329,553,496	1	329,553,496	3	988,660,488	SUB KOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	SUB KOORDINATOR LAYANAN E-GOVERNMENT
<b>2,20,02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:%)</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>105,289,692</b>	<b>60</b>	<b>130,289,692</b>	<b>70</b>	<b>130,289,692</b>	<b>70</b>	<b>365,869,076</b>	<b>KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIKA</b>
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral sebagai Sarana Perencanaan dan Evaluasi (Dengan Satuan:%)	81	90	105,289,692	100	130,289,692	100	130,289,692	100	365,869,076	SUB KOORDINATOR STATISTIK
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	90,289,942	1	115,289,942	1	115,289,942	1	320,869,826	SUB KOORDINATOR STATISTIK
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	14,999,750	3	14,999,750	3	14,999,750	3	44,999,250	SUB KOORDINATOR STATISTIK

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2,21,02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)	100	100	213,749,435	100	238,749,435	100	238,749,435	100	691,248,305	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIKA
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) (Dengan Satuan:%)	0	100	161,353,035	100	161,353,035	100	161,353,035	100	484,059,105	SUB KOORDINATOR PENGAMANAN DAN PENGAWASAN PERSANDIAN
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	25,355,000	1	25,355,000	1	25,355,000	3	76,065,000	SUB KOORDINATOR PENGAMANAN DAN PENGAWASAN PERSANDIAN
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	135,998,035	1	135,998,035	1	135,998,035	3	407,994,105	SUB KOORDINATOR PENGAMANAN DAN PENGAWASAN PERSANDIAN
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:%)	0	21	52,396,400	27	77,396,400	30	77,396,400	30	207,189,200	SUB KOORDINATOR TATA KELOLA DAN OPERASIONAL PERSANDIAN
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	7	52,396,400	9	77,396,400	10	77,396,400	10	207,189,200	SUB KOORDINATOR TATA KELOLA DAN OPERASIONAL PERSANDIAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			TOTAL	13,463,826,995		13,752,576,904		13,849,434,450		41,065,838,353		

## **BAB VII**

### **KINERJA URUSAN PENYELENGGARAAN BIDANG**

Bagian Penting dan proses penyusunan renstra 2024-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja urusan langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam table 7.1 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu**  
**pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPD
				2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
2	Persentase unit kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	30,30	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	30	60	70	70
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemeritah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100

**Tabel 7.2**  
**Sasaran Program dan Kegiatan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**

NO	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,2	2,6	2,8	3	3
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien		Persentase data dan informasi penyelenggaraan pemerintah yang dikomunikasikan/did esiminasikan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara online terintegrasi	persen	100	25	50	75	75

NO	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan layanan dan data statistik sektoral.		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	Persen	100	100	100	100	100
*	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,81	77,86	77,91	77,96	77,96
		Tercapainya Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	NA	100	100	100	100
*	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	Presentase tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	Persen	100	100	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin	Presentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin	Persen	NA	20	30	40	40

NO	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
*	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Presentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah	Presentase pengadaan barang milik perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100
*	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Presentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	persen	100	100	100	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya barang milik daerah dalam kondisi baik	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100

NO	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
*	Program Aplikasi Informatika.	Meningkatnya Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	30,30	100	100	100	100
*	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	PD/Unit Kerja	10	50	70	90	90

NO	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
*	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Persentase layanan e-Government (administrasi pemerintah dan public) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	25	50	75	75
*	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatkannya masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Persen	100	100	100	100	100

NO	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
*	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Pesen	100	30	75	100	100
*	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	Persen	100	30	60	70	70

NO	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
*	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebagai sarana perencanaan dan evaluasi	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebagai sarana perencanaan dan evaluasi	Persen	100	90	100	100	100
*	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	persen	100	100	100	100	100

NO	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
*	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI).	Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI).	Persen	60	100	100	100	100
*	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perangkat daerah yang memiliki jaringan komunikasi sandi	Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan komunikasi sandi	Persen	NA	100	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 merupakan rencana yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan informatika.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Semoga kedepan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya good governance.